

**PENJABARAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN**

Cindy Maisharah Putri¹, Yona Arizka Tobing²

220205128@student.umri.ac.id¹, 220205138@student.umri.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama yang banyak dikaji terkait sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Mengadopsi metode kajian literatur dengan menyelidiki 15 artikel jurnal dengan rentang tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan tema-tema utama yang sering ditemukan dalam penelitian tentang demokrasi di Indonesia, yaitu sejarah demokrasi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dan dapat membantu pengembangan pemahaman tentang sistem demokrasi di Indonesia. Untuk penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dan analisis penelitian, serta memperdalam penjabaran lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan perubahan signifikan dalam penelitian sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Demokrasi, Sistem Pemerintahan, Hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan. (Manurung et al., 2022)

Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat untuk mengelola kehidupan kenegaraan. Memang demokrasi bukan satu-satunya model yang paling sempurna untuk mengatur peri kehidupan manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Tumbangnya rezim komunisme di Eropa Timur menambah daftar panjang keunggulan demokrasi atas rezim rezim politik lain, sehingga kini demokrasi dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini. (Kaulan Karima et al., 2023)

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi. Pengertian mengenai kekuasaan tertinggi itu sendiri tidak perlu dipahami dalam pengertian monistik yang mutlak dan tidak terbatas, karena dengan sendirinya kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat dibatasi oleh kekuasaan negara. kesepakatan yang mereka utarakan bersama-sama dituangkan dalam rumusan konstitusi yang mereka buat dan diundangkan khususnya tentang berdirinya negara. Hal inilah yang disebut dengan kontrak sosial antar warga negara yang tercermin dalam konstitusi. Konstitusi itulah yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dilaksanakan dan dipelihara dalam kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Pada hakikatnya, dalam gagasan kedaulatan rakyat, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang merupakan pemilik sesungguhnya negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan seluruh fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang mempunyai kewenangan untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan. Terlebih lagi, setiap kegiatan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Bagi rakyatlah segala manfaat yang diperoleh dari berfungsinya dan penyelenggaraan negara diperuntukkan. Inilah gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang sepenuhnya dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan dengan rakyat. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang paling umum di dunia. Sistem demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. (Tedjo P, 2019)

Salah satu pilar demokrasi adalah trias politica yang membagi ketiga kekuatan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. (Tedjo P, 2019)

Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak-hak rakyat dalam demokrasi antara lain hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk berserikat, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Kewajiban rakyat dalam demokrasi antara lain kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban untuk mematuhi hukum.

Demokrasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya. Keunggulan demokrasi antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
2. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
3. Mengembangkan hak asasi manusia.
4. Demokrasi menjamin hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak berekspresi, dan hak untuk mendapatkan keadilan.
5. Menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan transparan.
6. Demokrasi mendorong pemerintahan untuk bertindak secara adil dan transparan, karena pemerintahan harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat.

Meskipun memiliki keunggulan, demokrasi juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan demokrasi antara lain:

1. Proses pengambilan keputusan yang lama.
2. Dalam demokrasi, proses pengambilan keputusan harus melalui proses yang melibatkan banyak pihak, sehingga prosesnya dapat memakan waktu yang lama.
3. Kecenderungan terjadinya konflik.
4. Dalam demokrasi, terdapat perbedaan pendapat yang wajar di antara rakyat. Perbedaan pendapat ini dapat menimbulkan konflik, jika tidak dikelola dengan baik.
5. Kecenderungan terjadinya korupsi.
6. Dalam demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat. Jika rakyat tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, maka kekuasaan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. (Dedi A, 2021)

Meskipun memiliki kelemahan, demokrasi tetap merupakan sistem pemerintahan yang paling ideal. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan dan mengembangkan demokrasi di seluruh dunia.

Ada beberapa kesenjangan yang perlu diatasi dalam kajian dinamika demokrasi di Indonesia terkait dengan menjadi tokoh pahlawan daerah dan nasional RI abad 21. Pertama, kurangnya kesadaran publik mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Kesadaran publik mengenai demokrasi dan hak asasi manusia sangat penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini menjadi kendala dalam memperkuat partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi.

Kedua, kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sistem demokrasi Indonesia. Meskipun Indonesia sudah memasuki era demokrasi, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memperkuat sistem demokrasi. Diperlukan kajian yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai dinamika sistem demokrasi Indonesia agar dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Ketiga, kurangnya kepemimpinan yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajiban warga negara. Dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, diperlukan pemimpin yang berdedikasi dan memiliki kemampuan dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi calon-calon pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Keempat, masih rendahnya partisipasi aktif dan kesadaran publik dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik. Di Indonesia, masih banyak warga negara yang tidak terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kesadaran publik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Kelima, masih banyaknya tindakan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Tindakan ini tidak saja merusak sistem demokrasi, tetapi juga merugikan secara ekonomi dan sosial. Diperlukan tindakan yang efektif dan responsif dari pihak pemerintah untuk memerangi

korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kajian Dinamika demokrasi di Indonesia bertujuan untuk memahami dan menganalisis dinamika perkembangan sistem demokrasi Indonesia pada era reformasi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks menjadi tokoh pahlawan daerah dan nasional RI abad 21, pemahaman yang lebih baik dan analisis yang lebih mendalam mengenai demokrasi di Indonesia dapat membantu individu untuk lebih memahami aspek-aspek jati diri nasionalisme Indonesia serta menjadi inspirasi bagi mereka untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia secara individu atau dalam komunitas masing-masing. (Santoso G, et al., 2023.)

Ada perbedaan pandangan dan opini mengenai demokrasi di Indonesia, terutama terkait dengan pandangan politik dan ideologi. Hal ini sering kali menimbulkan polarisasi dalam masyarakat, sehinggamempersulit upaya untuk memperkuat sistem demokrasi yang sehat. Lalu, Kurangnya partisipasi aktifwarga negara dalam proses politik. Partisipasi aktif warga negara dalam proses politik sangat pentinguntuk memperkuat sistem demokrasi. Namun, masih banyak warga negara yang kurang peduli atau bahkan acuh terhadap urusan politik. Kurangnya partisipasi dan kesadaran publik ini mempersulitupaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi. Lalu, masih lemahnya tata kelola dan sistem pemerintahan yang efektif. Lemahnya tata kelola dan sistem pemerintahan menyebabkan banyak masalah seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini merusak sistem demokrasi dan memicu rasa ketidakpercayaan dari masyarakat kepada institusi pemerintah. Lalu, masih belum terbentuknya kepemimpinan yang kuat dan berdedikasi dalam memperkuat sistem demokrasi. Kepemimpinan yang kuat dan berdedikasi dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajiban warga negara sangat penting untuk memperkuat sistem demokrasi. Namun, masih sedikit pemimpin yang mampu memperjuangkan hak-hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Beberapa tokoh dan masyarakat memiliki keresahan terkait dengan perkembangan demokrasi diIndonesia dan keterlibatan tokoh pahlawan dalam mendorong perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Beberapa keresahan yang muncul antara lain kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya demokrasi sebagai landasan negara demokrasi, serta kurangnya dukungan terhadap upaya-upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. (Santoso G, et al., 2023)

METODE PENELITIAN

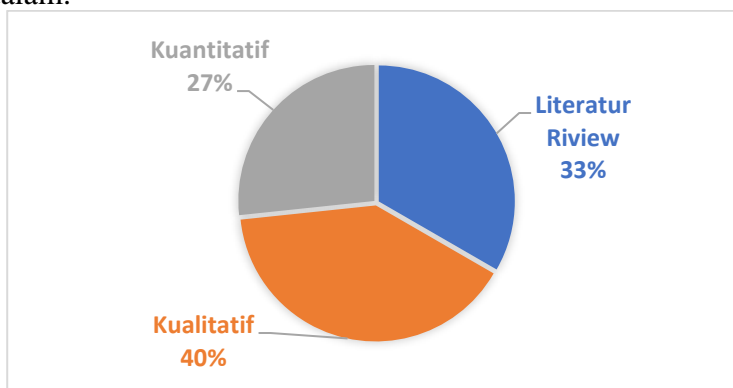
Dalam rangka menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang Sistem Demokrasi di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (Arifin, I 2019) yang melibatkan penyelidikan terhadap 15 artikel jurnal yang dipublikasikan antara tahun 2019 hingga 2023. Kajian literatur merupakan sebuah metode yang melibatkan penyelidikan, analisis, dan sintesis literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, tujuan kajian literatur untuk memahami perkembangan penelitian Sistem Demokrasi sebelumnya, temuan-temuan yang telah ada, dan kerangka pemikiran yang telah dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam domain yang sama atau terkait. Tujuan utama penelitian ini untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menguraikan tema-tema krusial yang secara konsisten muncul dan mendominasi diskusi akademik dan penelitian terkait Sistem Demokrasi di Indonesia. (Arifin, I.2019)

PEMBAHASAN

Hasil Pencarian Data Publikasi Artikel Jurnal Tentang Sistem Demokrasi

Berdasarkan data mengenai metode yang digunakan dalam artikel jurnal sistem demokrasi sebagaimana terlihat pada gambar 1. Dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas penelitian lebih memilih pendekatan kualitatif yaitu sebanyak 6 artikel dari 15 artikel yang dikaji. Setelah itu 5 artikel menggunakan metode literatur riview, dan 4 artikel menggunakan metode kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif lebih beorientasi terhadap pengumpulan data dan juga kajian

Pustaka (literatur rievew) cenderung berfokus pada analisis naratif, pemahaman mendalam, dan tinjauan literatur yang luas . Preferensi ini bisa dipengaruhi oleh kompleksitas pandangan kajian dari beberapa sudut pandang jurnal system demokrasi dan kebutuhan untuk memahami pengalaman individu secara mendalam.

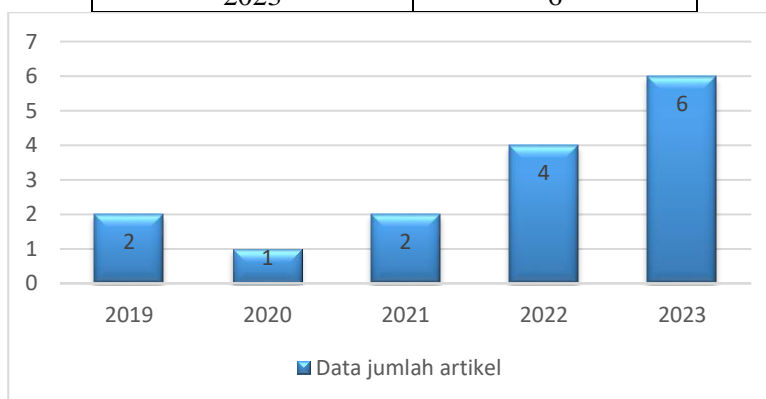


Gambar 1. Metode yang Digunakan dalam Penelitian

Data dalam Tabel 1 dan gambar 2 dibawah, menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam jumlah artikel jurnal yang mengkaji sistem demokrasi selama periode tahun 2019 hingga 2023. Pada awal periode ini, pada tahun 2019, terdapat 2 artikel yang menyelidiki topik ini, tetapi jumlah ini naik drastis secara konsisten dan bertahap hingga mencapai 6 artikel pada tahun 2023. Kenaikan ini dapat dianggap sebagai refleksi dari banyaknya minat penelitian dalam komunitas akademik. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti Pembangunan ekonomi, Sejarah dan Masyarakat madani. Dalam konteks ini, data tersebut memberikan indikasi kuat tentang dinamika penelitian selama periode waktu yang disebutkan. Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk mendalami lebih lanjut tentang perubahan dalam minat akademik terkait dengan masalah-masalah demokrasi yang ada di Indonesia.

Tabel 1. Data jumlah artikel sistem demokrasi

Tahun	Jumlah artikel
2019	2
2020	1
2021	2
2022	4
2023	6



Gambar 2. Data Jumlah Artikel Demokrasi

Secara garis besar, secara signifikan dari tahun 2019 terdapat 2 artikel, setelah setahun yaitu 2020, turun menjadi 1 artikel, setelah 3 tahun naik secara konsisten secara bertahap menjadi 6 artikel. 2023 mencerminkan adanya kenaikan yang signifikan dalam minat penelitian di kalangan komunitas akademik yang menelaah system demokrasi yang ada di Indonesia. Data tersebut menunjukkan indikasi yang kuat mengenai evolusi minat akademik dalam meneliti demokrasi yang berkaitan dengan ekonomi, Sejarah, perkembangan islam di Indonesia dan masih banyak lagi. Setelah dilihat pada

diagram diatas, disimpulkan 2019 hanya dua artikel dan naik menjadi 6 pada tahun 2023.

Sistem demokrasi Indonesia menurut prespektif Islam

Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik dan pemerintahan yang dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, atau suatu doktrin yang mengakuibahwa rakyat dalam suatu sistem pemerintahan negara dipercaya memiliki kapasitas untuk memimpin masyarakat. Gagasan ini awal mulanya muncul pada abad kelima sebelum masehi di Yunani Kuno. Khususnya dikalangan penduduk Athena.

Demokrasi adalah salah satu konsep yang berasal dari Barat. Demokrasi baru masuk dalam khazanah pemikiran Islam pada paruh abad ke-19 karena dianggap mempunyai nilai-nilai baik bagi kehidupan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pada permulaan abad ke 20 para pemikir Islam membicarakan dan mengkaji hubungan Islam dan demokrasi. Mereka menganggap bahwa demokrasi memiliki nilai positif.

Dalam wacana dan kajian-kajian tentang hubungan Islam dan demokrasi, terdapat tiga pendapat yang dikemukakan oleh pemikir dan tokoh-tokoh Islam tentang hubungan Islam dan demokrasi. Pertama, tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi inheren atau bagian integral dari Islam. Karena itu, demokrasi tidak perlu dihindari dan menjadi urusan dari Islam. Demokrasi merupakan instrumen untuk mewujudkan dakwah Islamiyah, sehingga masuk dalam proses politik khususnya dalam proses demokrasi menjadi suatu keharusan dalam Islam.

Kedua, antara Islam dan demokrasi memiliki hubungan yang saling bertentangan. Hubungan Islam dan demokrasi dipandang saling berhadapan, berlawanan dan saling bermusuhan. Islam dan demokrasi tidak memiliki hubungan sama sekali. Keduanya saling terpisah dan tidak saling terkait. Dalam Islam tidak dikenal yang namanya demokrasi. Demokrasi merupakan produk Barat dan tidak bersumber dari Islam, demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. Hubungan ini sering disebut dengan hubungan antagonistik atau hubungan yang saling bertentangan.

Ketiga, dalam hubungan Islam dan demokrasi kelompok ketiga tidak menerima sepenuhnya dan tidak menolak sepenuhnya. Artinya mereka mengakui antara Islam dan demokrasi memiliki kesamaan dan perbedaan. Dalam demokrasi dikenal beberapa nilai etis yang memiliki kesamaan dengan Islam, seperti kebebasan (al-hurriyah), persamaan (al-Musawwa), toleransi (at-tasammuh), keadilan (al-adalah) dan lain-lain. Dan perbedaan antara Islam dan demokrasi adalah dari sisi sumbernya. Demokrasi dapat diterima dan diberlakukan dalam suatu negara dengan beberapa catatan penting yang tidak bisa diabaikan. (Taufik & Abu, 2020)

Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy) pada masa revolusi (1945 – 1950). Setelah itu Demokrasi Liberal pada masa Orde Lama (1950 - 1959). Kemudian beralih ke Demokrasi Terpimpin yang juga pada masa Orde Lama (1959 – 1966). Setelah demokrasi termpimpin beralih lagi Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (1966– 1998). Pada Orde Reformasi (1998 – sekarang), demokrasi yang digunakan adalah Demokrasi Reformasi.(Syahdiyono, F. 2022)

Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022.

Perkembangan demokrasi di Indonesia memakan waktu yang cukup panjang, lantaran menjaga stabilitas politik tidaklah mudah. Meskipun era reformasi dianggap sudah cukup memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat, penerapan demokrasi tidak akan pernah berhenti berkembang. Untuk memastikan perkembangan penerapan sistem demokrasi dijalankan dengan baik, refleksi sejarah perlu dilakukan. Dengan melakukan refleksi sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, rakyat dapat memahami unsur-unsur yang menjadi titik lemah maupun kekuatan dari setiap sistem demokrasi yang diterapkan pada periode-periode tertentu. Demokrasi tidak hanya sekedar bentuk pemerintahan dan sistem politik tetapi juga pola hidup demokratis baik dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara. Oleh sebab itu, mempelajari proses perkembangan demokrasi serta refleksi sejarah sangatlah penting bagi

setiap individu. Masyarakat yang mempelajari sistem demokrasi dapat menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, setiap individu dapat mendukung jalannya pemerintahan serta sistem politik yang demokratis. Kehidupan masyarakat yang demokratis tentu memberikan berbagai manfaat bagi bangsa dan negara. Lingkungan hidup warga negara akan menjadi positif dan damai. Secara tidak langsung, menyejahterakan kehidupan warga negara.

Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai demokratis dapat memberikan banyak manfaat. Kondisi demokrasi pada era kini, yakni tahun 2021-2022, tercatat mengalami kemajuan dari segi indeks penilaian. Dilansir dari berita yang ditulis oleh Trihusodo (2022), indeks demokrasi bertengger naik pada peringkat 52, dengan kisaran 6,30-7,03. Sistem penilaian ditentukan berdasarkan 5 faktor, yaitu proses pemilu, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan serta partisipasi politik, dan politik budaya.

Bagian yang mengalami perkembangan paling baik adalah penerapan fungsi pemerintahan. Dengan penerapan fungsi pemerintahan yang baik, Indonesia dapat memperkuat stabilitas politik dan bidang lainnya. Dengan mempelajari tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, tim penulis kini dapat memahami bahwa menyusun suatu sistem pemerintahan yang mampu mengelola berbagai bidang tidaklah mudah. Diperlukan perhatian terhadap beberapa aspek, pencegahan konflik secara internal maupun eksternal, serta menyatukan masyarakat dalam ideologi Pancasila. Setiap periode demokrasi yang diterapkan memiliki kelebihan serta kekurangan tersendiri. Sejauh ini pada tahun 2022, sistem demokrasi di Indonesia berkembang semakin baik. Sistem pemilu sudah diterapkan dengan prinsip kedaulatan ditangan rakyat. Pembagian wewenang baik di pusat maupun daerah memiliki struktur yang baik dan merata. Untuk mendukung perkembangan demokrasi semakin condong ke arah yang lebih baik, peran masyarakat dibutuhkan. Hal itu dikarenakan sistem demokrasi yang kini dianut adalah sistem demokrasi Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Manurung et al., 2022)

Perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama pada awal kemerdekaan, mengalami naik-turun yang menyebabkan berbagai konflik. Dimulai dari munculnya demokrasi parlementer yang memiliki dasar prinsip baik, namun penerapannya masih kurang. Kemudian demokrasi terpimpin menggantikan demokrasi parlementer karena dekrit presiden 5 Juli 1959.

Sistem pemerintahan yang condong ke arah komunis menyebabkan PKI sempat melakukan pemberontakan dan Soekarno digantikan oleh Soeharto. Demokrasi Pancasila era orde baru kemudian dilaksanakan selama kurang lebih 32 tahun. Dikarenakan stabilitas negara yang menurun, era reformasi kemudian dilakukan dan dipelopori oleh B.J.Habibie.

Mempelajari perkembangan demokrasi di Indonesia, menerapkan nilai-nilai demokratis, serta melakukan refleksi sejarah merupakan hal-hal yang penting bagi warga negara karena dapat memberikan dampak yang positif. Dengan demikian, menganalisis lebih dalam mengenai sejarah setiap periode dalam perkembangan demokrasi perlu dilakukan. Memahami konsep dan sejarah demokrasi di Indonesia dapat menyadarkan masyarakat dalam mendukung perkembangan demokrasi tahun 2022. (Manurung et al., 2022)

KESIMPULAN

Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua yaitu Prinsip Demokrasi Sebagai Sistem Politik dan Prinsip Non demokrasi (Kediktatoran). Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Yaitu Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat (Demokrasi Langsung, Demokrasi Tidak Langsung) dan Demokrasi (Berdasarkan Prinsip Ideologi, Demokrasi Liberal, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Pancasila). Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan

kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan social masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi Di Indonesia . In *ADVANCES in Social Humanities Research* (Vol. 1, Issue 5) Hal 633.
- Arifin, I. (2019). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Analysis of the Application of Government Political Democracy and Social Welfare in Indonesia . Page 57 of 61 Volume 1 Nomor 2.
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal MODERAT*, 7(1) hal 2.
- Karima, M, K,. (2023). Perjalanan Demokrasi Indonesia Dan Problematikanya. *Educandumedia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* In *Jurnal Educandumedia* (Vol. 02 No. 1) hal 109.
- Manurung, C. E., Zee, C., Nathanael, N., & Ernando, R. (2022). Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022. 1, 1-1 hal 5.
- Nasution, T., Hairini Siregar, N., Luthfiansyah, F. A., Ramadhani, N., Angkat, C. T. D. E., Sihite, R. N., Pohan, D. A., Marunduri, R. A., Panjaitan, M. F., Aulia, R. G., Nasution, M., & Andrika, N. (2023). *educandumedia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)* Persamaan dan Perbedaan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dengan Negara Lain. Vol.02 No.01 hal 27.
- Prasisko, Y. G. (2019).Demokrasi Indonesia Dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal MODERAT*, Volume 7, Nomor 1, hal 11.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. Volume 18 Nomor 2 hal 251.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. Vol 2 (1) : 225-226.
- Syahdiyono, F. 2022. Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2, hal 4.
- Taufik M & Abu A. 2020. Islam dan Demokrasi. *Jurnal Studi Ilmu pengetahuan Sosial* Volume 1 (Issue 1), hal 1-14.
- Tedjo P. (2019) Administrasi, M., & Semarang, F. U. Perkembangan Demokratisasi dalam Sistem Politik Demokrasi di Indonesia. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, Volume 15 No. 19, hal 5.